



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN
2023**

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

**Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta, 55213

Telp. (0274) 562811 Pes. 1117

Fax. (0274) 564554

www.bpka.jogjaprov.go.id

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦩꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦸꦁꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpn (0274) 561515 Ext. 1117-1122

Faximile (0274) 564544

YOGYAKARTA – Kode Pos 55213

Website : bpka.jogjaprov.go.id e-mail : bpka@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 065/03120/SET

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada BPKA DIY tentang ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 13 April 2023

 **KEPALA BPKA DIY**

WIYOS SANTOSO, SE., M.A.
NIP. 19680215 199403 1 005

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 065/03120/SET

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) sebagai badan publik berkewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat dan mudah.

BPKA DIY merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian tugas dan fungsi BPKA DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 123 tahun 2023 tersebut BPKA DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan salah satu tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, maka disusunlah standar layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

1. Tugas PPID Pembantu

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki susunan organisasi pengelola sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Adapun Tugas PPID Pembantu adalah mengkoordinasikan :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
 - 1) Informasi yang bersifat publik, meliputi :
 - i. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - ii. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - iii. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - iv. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan;
 - 2) Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan BPKA DIY;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.

2. Jam Operasional Pelayanan Informasi Publik BPKA DIY

Jam layanan Informasi Publik oleh PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah sebagai berikut:

Hari Senin – Kamis	: 08.00 – 15.30 WIB	jam istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Hari Jumat	: 08.00 – 14.00 WIB	jam istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

3. Alamat Desk Informasi BPKA DIY

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213.

No. Telepon : (0274) 562811 Ext. 1117

Faksimili : (0274) 564544

E-mail : bpka@jogjaprov.go.id

Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id>

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jenis Pelayanan Layanan Informasi Publik (PPID Pembantu)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik; 3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain; 4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik yang telah diisi dengan dilampiri fotocopy KTP/SIM pemohon]) --> B[Petugas mencatat identitas pemohon, subyek dan format informasi yang diminta. Petugas kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon] B --> C{Informasi dikecualikan?} C -- TIDAK --> D[Petugas memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Mengirimkan tanda bukti penyerahan Informasi Publik] C -- YA --> E[Petugas menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan berlaku.] D --> F[Petugas mencatat : jumlah permohonan Informasi Publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik, jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak beserta alasannya.] E --> F F --> G([Petugas menyimpan/mengarsip dokumen kegiatan Pelayanan Informasi Publik]) </pre>

		<p>Media/saluran Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website atau email; Dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (http://bpka.jogjaprov.go.id) atau melalui email dengan alamat : bpka@jogjaprov.go.id. 2. Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0274) 562811 Ext. 1117 atau melalui fax di nomor (0274) 564544. 3. Melalui aplikasi E-lapor.jogjaprov.go.id; Dapat mendownload aplikasi e lapor.jogja.prov yang tersedia pada play store 3. Langsung; Datang langsung ke Desk Layanan Informasi yang beralamat di BPKA DIY, Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/tarif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi.
5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana dimuat dalam Daftar Informasi Publik (DIP) BPKA DIY.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang beralamat di Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213; 2. e-mail : bpka@jogjaprov.go.id; 3. Website : http://bpka.jogjaprov.go.id; 4. Telepon : (0274) 562811 Ext. 1117; 5. Faksimili : (0274) 564544. 6. Melalui aplikasi E-lapor.jogjaprov.go.id; <p>Dapat mendownload aplikasi e lapor.jogja.prov yang tersedia pada play store</p>
----	--	--

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan Informasi; Formulir Keberatan Informasi; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi; Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar Informasi Publik.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan informasi memiliki kompetensi sesuai standarisasi pengelolaan layanan informasi publik.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	BPKA DIY memberikan jaminan kepastian waktu proses, persyaratan dan kepastian biaya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPKA DIY menjaga kerahasiaan data pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY.
9.	Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik	<p>Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan alasan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang

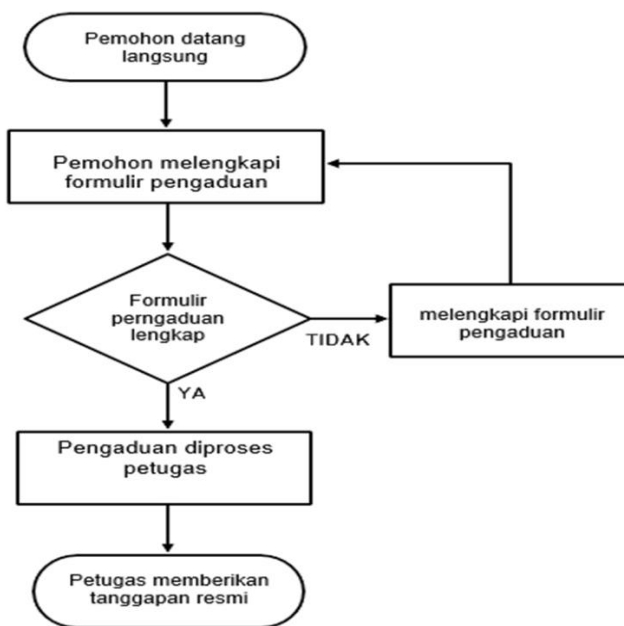
		<p>diminta;</p> <p>2. tidak dipenuhinya permintaan informasi;</p> <p>3. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau</p> <p>4. penyampaian informasi yang melebihi waktu</p>
10.	Aksesibilitas	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang beralamat di Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213;</p> <p>1. E-mail : bpka@jogjaprov.go.id;</p> <p>2. Website : http://bpka.jogjaprov.go.id;</p> <p>3. Telepon : (0274) 562811 Ext. 1117;</p> <p>4. Faksimili : (0274) 564544.</p>
11.	Waktu Pelayanan	<p>Jam layanan informasi publik BPKA DIY adalah sebagai berikut:</p> <p>Hari Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Hari Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>

2. Satuan Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Warga Negara Indonesia;</p> <p>2. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik;</p> <p>3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain;</p>

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan;
3. Petuga memproses pengaduan;
4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi.

Media/saluran informasi :

1. Melalui website atau email;
Dapat menyampaikan pengaduan melalui website (<http://bpka.jogjaprov.go.id>), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bpka@jogjaprov.go.id.
2. Melalui Telepon/fax;
Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0274) 562811 Ext. 1117 atau melalui fax di nomor (0274) 564544.
3. Melalui aplikasi E-lapor.jogjaprov.go.id;
Dapat mendownload aplikasi e-lapor.jogjaprov yang tersedia pada play store .
4. Langsung;
Datang langsung ke Desk Layanan Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang beralamat di Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213

3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun website.
4.	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang beralamat di Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213; 2. E-mail : bpka@jogjaprov.go.id; 3. Aplikasi : e-lapor.jogjaprov.go.id; 4. Website : http://bpka.jogjaprov.go.id; 5. Telepon : (0274) 562811 Ext. 1117; Faksimili : (0274) 564544.

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 2. Permenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan, meja, kursi, telepon dan formulir.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang.
6.	Jaminan pelayanan	BPKA DIY memberikan jaminan kepastian waktu proses, persyaratan dan kepastian biaya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPKA DIY menjaga kerahasiaan data pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
9.	Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik	Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
9.	Aksesibilitas	Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang beralamat di Gedung Puntadewa Lantai I Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta 55213. 1. E-mail: bpka@jogjaprovo.go.id ; 2. Telepon: (0274) 562811 Ext. 1117; 3. Faksimili: (0274) 564544; 4. Website: http://bpka.jogjaprovo.go.id .
10.	Waktu Pelayanan	Jam layanan informasi publik BPKA DIY adalah sebagai berikut: Hari Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Hari Jumat : 08.00 – 14.00 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB


 KEPALA BPKA DIY
 WIYOS SANTOSO, SE., M.A. cc
 NIP. 19680215 199403 1 005



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MAKLUMAT PELAYANAN

**"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**

Yogyakarta, Maret 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.

NIP. 19680215 199403 1 005

B

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

ꦠꦁꦠꦏꦱꦱꦭꦒꦤ꧀ꦢꦏꦚꦏꦏꦏꦽꦱꦏꦏꦁꦏꦏꦁꦏꦏꦁꦏꦏꦁꦏꦏꦁ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpun (0274) 561515 Ext. 1117-1122
Faximile (0274) 564544

YOGYAKARTA – Kode Pos 55213

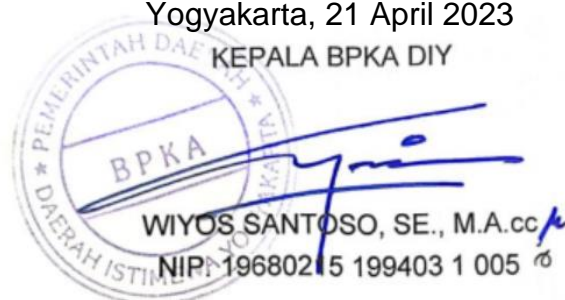
Website : bpka.jogjaprov.go.id e-mail : bpka@jogjaprov.go.id

BLANGKO IDENTIFIKASI REVIEW STANDAR PELAYANAN TAHUN 2023

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SUBSTANSI PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Layanan Informasi Publik	Tidak Ada	-	Tidak Ada Perubahan Standar Pelayan
2	Layanan Pengaduan	Tidak Ada	-	Tidak Ada Perubahan Standar Pelayan

Yogyakarta, 21 April 2023

KEPALA BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, SE., M.A.c.c.
NIP: 19680215 199403 1 005